



MODEL KEMTRAAN MULTISTAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/ MADRASAH DAN KURIKULUM MERDEKA UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH

Okke Rosmaladewi ¹
Hilman Farouq Ghoer ²
Cece Hidayat ³

^{1,2} Universitas Islam Nusantara

³ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung
Email; okkerosmala@yahoo.co.id

Abstract

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad-21 serta perkembangan dunia yang sangat cepat dan tidak menentu, diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada Madrasah. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/ Madrasah dan Kurikulum Merdeka menjadi sangat strategis dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan. Kemitraan multistakeholder dalam implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan prinsip membangun system Pendidikan yang bermutu, Kemitraan multistakeholder, Pengelolaan lingkungan khususnya dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien serta Pemberdayaan Sekolah. Metode Penelitian yang digunakan adalah Research and Development model ADDIE, dengan siklus Analysis lingkungan Internal dan eksternal, Design model MBS/M dan Kurikulum Merdeka bersama lembaga mitra. Development model di Lembaga mitra, Implementasi model dan Evaluasi bersama untuk perbaikan berkelanjutan. Model Kemitraan multistakeholder dengan membangun system Pendidikan melalui MBS/M dan Kurikulum Merdeka menawarkan suatu otonomi kepada Madrasah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat serta menjalin kerja sama antara madrasah, masyarakat dan pemerintah. Melalui model kemitraan multistakeholder, Kepala sekolah, Guru dan Peserta didik mendapatkan peluang untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan perencanaan, Implementasi, evaluasi dan pengembangan kurikulum, pengembangan perangkat p pembelajaran, manajemen sekolah yang berbasis mutu, dan peningkatan profesional guru secara berkelanjutan.

Kata Kunci; Multistakeholder, MBS, MBKM

Abstract

Along with the changing paradigms of learning in 21st-century and the rapidly evolving and uncertain world, a new approach is needed in the management of education and learning in Madrasah (Islamic educational institution). The implementation of School/Madrasah-Based Management and Curriculum Independence becomes highly strategic in order to enhance the quality, relevance, and service of education. Multistakeholder partnerships in the implementation of School/Madrasah-Based Management and Curriculum Independence are carried out based on the principles of building a quality education system, multistakeholder partnerships, effective and efficient environmental management of resources, and empowering schools. The research method used is the Research and Development model ADDIE, with cycles of internal and external environmental analysis, designing the School/Madrasah-Based Management and Curriculum Merdeka with partner institutions. The development model is carried out in partner institutions, and the model is implemented and evaluated together for continuous improvement. The multistakeholder partnership model, by building an education system through School/Madrasah-Based Management and Curriculum Independence, offers autonomy to Madrasahs to enhance quality, efficiency, and equalization of education to accommodate societal

Article history

Diterima redaksi:
November 2023

Selesai revisi:
November 2023

Diterbitkan
Online:
December 2023

Citation (APA Style): Okke Rosmaladewi, Hilman Farouq Ghoer, Cece Hidayat (2023). Model Kemtraan Multistakeholder dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan Kurikulum Merdeka untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. <https://ojs.idipri.or.id/index.php/JEMARI>

needs and foster collaboration between Madrasahs, communities, and the government. Through the multistakeholder partnership model, school principals, teachers, and students have the opportunity to innovate and improvise within the school regarding curriculum planning, implementation, evaluation, curriculum development, development of learning materials, quality-based school management, and sustainable teacher professional development.

Keyword: *Multistakeholder, MBS, MBKM*

A. PENDAHULUAN

Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam. Mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. (KEMENAG RI, 2022). Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad-21 serta perkembangan dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu, Madrasah dituntut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan IMTAQ maupun IPTEK. Untuk hal tersebut diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada madrasah.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Madrasah, masih banyak permasalahan yang dihadapi madrasah. Salah satunya adalah rendahnya mutu dan relevansi Pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Selama ini, madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam yang mutunya lebih rendah daripada mutu lembaga pendidikan lainnya terutama sekolah umum. Walaupun kenyataannya ada beberapa madrasah justru lebih maju daripada sekolah umum, namun belum mampu menghapus kesan negatif yang ada (Qomar, 2002: 80). Permasalahan yang lain adalah manajemen sekolah yang berkualitas serta profesionalisme guru yang harus segera ditingkatkan karena manajemen sekolah dan Guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas Pendidikan.

Menyikapi kondisi tersebut Madrasah harus berdaya dan senantiasa harus melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan, berani melakukan inovasi atau terobosan baru, dengan mengelola sumber daya yang efektif dan efisien dan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan mutu layanan kepada seluruh warga madrasah. Demikian juga Madrasah di bawah pengelolaan Kantor Wilayah KEMENAG Provinsi Jawa Barat harus segera beradaptasi dengan mengembangkan inovasi dan strategi yang baru dalam pengelolaan pendidikan yang bermutu. Sesuai dengan data EMIS Kementerian Agama RI Semester Ganjil 2019-2022, Jumlah Madrasah Aliyah di Indonesia sebanyak 8.807 lembaga dengan peserta didik 1.465.445 orang, pendidik 71.226 orang dan tenaga kependidikan yang mendukung 8.872 orang. Dengan jumlah yang besar, madrasah sangat strategis untuk melaksanakan system Pendidikan yang bermutu. Yang dapat meningkatkan citra Pendidikan madrasah di bawah pengelolaan KEMENAG RI. Untuk hal tersebut madrasah harus responsif dan secepatnya melakukan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan. Yaitu dengan pengelolaan sumberdaya sekolah yang efektif dan efisien melalui MBS/M serta memanfaatkan teknologi untuk menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu. Sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai dengan Visi, Misi dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat no 1078 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 yang salah satu tujuannya yaitu peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas serta Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif. Untuk mencapai tujuan tersebut Kantor Wilayah KEMENAG Provinsi Jawa Barat senantiasa mendorong dan memberi ruang yang seluas-luasnya khususnya kepada Madrasah untuk mengelola dan mengembangkan Pendidikan yang bermutu serta mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan yang sesuai dengan kondisi, potensi dan kekhasan madrasah. Menurut Hasan Arie, (2016: 10). Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) merupakan suatu pengelolaan sekolah/madrasah yang dianggap ideal dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di

sekolah/madrasah. Karena dengan konsep MBS/M ini sekolah/madrasah diharapkan dapat mengelola institusinya secara otonom, transparan dan partisipatif. Yang merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan sekolah/madrasah yang efektif dan produktif.

Sesuai dengan KMA No. 347 Tahun 2022, Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah, bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka diterapkan di Madrasah secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022-2023. Untuk hal tersebut memerlukan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) yang merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada sekolah/madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Umar Siddik (2018: 5) menjelaskan manajemen madrasah adalah keseluruhan proses kerjasama sekelompok orang dengan menggunakan sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan madrasah secara efektif dan efisien. Pekerjaan manajemen pendidikan di madrasah meliputi segala jenis kegiatan manajemen yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Pendidikan.

Untuk melaksanakan MBS/M dan kurikulum merdeka di Madrasah banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Diantaranya: Madrasah belum membangun system Pendidikan yang berbasis mutu, pengelolaan sumberdaya belum efisien, Madrasah belum mampu melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum. Untuk menentukan kurikulum operasional di Madrasah memerlukan kolaborasi dengan stakeholder sehingga capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kebutuhan stakeholder sebagai pengguna dari lulusan. Selain itu kompetensi Guru yang masih rendah dalam mengembangkan perangkat pembelajaran, merencanakan pembelajaran berbasis proyek dan melaksanakan Penelitian Tindakan kelas (PTK) serta penulisan artikel yang akan dipublikasikan. Semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi menuntut pemecahan yang serius, agar Madrasah dapat melaksanakan system Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi serta berakhlakul karimah.

Demikian juga Madrasah yang berada di wilayah KEMENAG Provinsi Jawa Barat umumnya belum membangun system Pendidikan yang komprehensif yang berbasis mutu. Pelaksanaan Pendidikan berdasarkan kondisi dan instruksi dari KEMENAG RI padahal Madrasah tersebut memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dan kemandirian dalam berkreasi, berinovasi, menciptakan layanan yang humanis, ramah, serta adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Untuk membangun system Pendidikan di Madrasah yang bermutu perlu dilakukan kemitraan agar madrasah segera beradaptasi sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan pembelajaran di madrasah. Untuk hal tersebut model kemitraan multistakeholder dengan pengelolaan berbasis MBS/M dalam implementasi kurikulum merdeka sangat penting untuk dilaksanakan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Research and Development (R&D) dengan model ADDIE yang dikembangkan oleh Dick and Carry (1996) terdiri dari lima tahap yaitu :

1. Analysis (Analisis) lingkungan Internal dan lingkungan eksternal. Analisis kebutuhan di Madrasah dengan mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan Pendidikan dan masalah dalam system Pendidikan yang dilaksanakan di madrasah.
2. Design (Perancangan) Pengelolaan system Pendidikan di madrasah berbasis MBS/M dan implementasi Kurikulum Merdeka untuk peningkatan mutu Pendidikan.

3. Development (Pengembangan) model kemitraan multistakeholder dalam pengelolaan system Pendidikan di madrasah melalui MBS/M, Revitalisasi kurikulum di madrasah dengan kurikulum Merdeka, peningkatan kapasitas kepala sekolah, wakasek kurikulum dan tenaga pendidik dalam pengelolaan pendidikan dan implementasi kurikulum Merdeka.
4. Implementation (Implementasi) model pembelajaran berbasis proyek melalui kemitraan multistakeholder dalam MBS/M dan Kurikulum Merdekadi Madrasah
5. Evaluation (Evaluasi) bersama stakeholder untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka.

Tahapan Pengembangan Model implementasi MBS/M dan kurikulum Merdeka untuk peningkatan mutu Pendidikan di madrasah, dilaksanakan melalui modifikasi dari sepuluh langkah penelitian dan pengembangan dari Borg dan Gall. Secara garis besar dikembangkan oleh Sukmadinata dan kawan-kawan terdiri atas tiga tahap, yaitu: 1) Studi Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Model.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model kemitraan multistakeholder dalam implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka berdasarkan prinsip membangun system Pendidikan di madrasah yang bermutu, kemitraan multistakeholder, pengelolaan lingkungan khususnya semua sumber daya yang ada di Masrasah serta pemberdayaan madrasah.

Dalam implementasi model ini Perguruan Tinggi yaitu UNINUS bermitra dengan Ikatan Doktor Ilmu Pendidikan-RI (IDIP-RI) dan Kantor KEMENAG Provinsi Jawa Barat dan KEMENAG Kabupaten /Kota. UNINUS dan IDIP-RI melaksanakan pendampingan kepada Madrasah dalam pengelolaan Pendidikan yang berbasis mutu dan mengembangkan kurikulum Merdeka di Madrasah. Serta meningkatkan kapasitas pendidik secara berkelanjutan. UNINUS melaksanakan Pendampingan untuk mewujudkan Tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Yang merupakan hilirisasi riset Perguruan Tinggi dalam Implementasi MBKM untuk mencapai Indikator Kinerja Utama PT. Sedangkan IDIP RI yang merupakan asosiasi profesi mempunyai kewajiban dalam pengawasan standar mutu Pendidikan.

Model kemitraan multistakeholder dalam MBS/M dan Kurikulum Merdeka di madrasah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Model Kemitraan Multistakeholder dalam Implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka di Madrasah

Model Kemitraan multistakeholder merupakan sinergitas antara Perguruan Tinggi dalam hal ini UNINUS untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ikatan Doktor Ilmu Pendidikan (IDIP) RI yang Jawa Barat dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang akan memberikan solusi terhadap

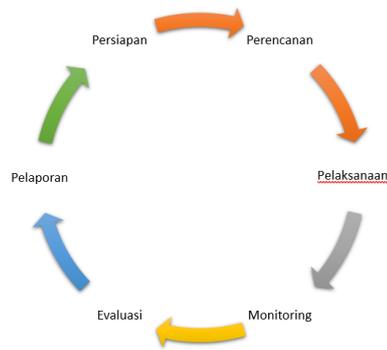
permasalahan pengelolaan pendidikan di madrasah. Dengan pendekatan kemitraan multistakeholder yang holistik berbasis riset multidisiplin, akan memberi ruang kreativitas dan inovasi kepada madrasah dalam pengelolaan berdasarkan MBS/M. Selain itu untuk menciptakan budaya mutu di madrasah. Melalui pengembangan kurikulum merdeka yang merupakan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan akan mendorong kemandirian madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, untuk meningkatkan mutu Pendidikan di Madrasah.

Mengembangkan budaya mutu di Madrasah merupakan hal yang paling penting. Karena terjadinya interaksi social di antara orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan baik dalam proses edukatif maupun pengelolaan. Budaya mutu yang di bangun di Madrasah secara bersama. Dan Kepala sekolah di Madrasah orang yang strategis dalam upaya mengembangkan mutu, yaitu dalam mengelola Pendidikan berbasis MBS/M dan membina tenaga pendidik, kependidikan dan peserta didik menjadisasar mutu yang diwujudkan dengan perilaku sadar mutu. Hal ini sesuai dengan Zarkasi Anwar (2023) Peningkatan kualitas pendidikan di madrasah tidak dapat dicapai tanpa adanya peningkatan kompetensi dan kualitas kepala madrasah. Peningkatan kompetensi dan kualitas kepala madrasah dapat dicapai jika kepala madrasah secara terus-menerus mengembangkan profesionalisme dan kompetensinya dengan baik dan terarah. Tantangan terbesar yang dihadapi kepala madrasah saat ini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial dan kewirausahaan kepala madrasah yang dapat menunjang terhadap peningkatan mutu dan pengembangan madrasah yang inovatif sehingga berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di madrasah.

Semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi MBS/M dan kurikulum merdeka di Madrasah menuntut pemecahan yang serius, agar pada TA 2022-2023 implementasi MBS/M dan kurikulum merdeka dapat terlaksana dan dikelola dengan baik sehingga pendidikan yang bermutu di Madrasah dapat terwujud. Yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu di Madrasah yang utama menyamakan komitmen pencapaian mutu oleh kepala sekolah, tenaga pendidik dan stakeholders meliputi; visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan di Madrasah karena setiap Madrasah mempunyai karakteristik yang berbeda. Selain itu Madrasah terus berupaya melaksanakan program peningkatan mutu secara berkelanjutan meliputi : revitalisasi kurikulum, pembinaan siswa, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, mewujudkan kemitraan dengan berbagai pihak. Selain itu juga Madrasah terus meningkatkan pelayanan administrasi dan tata kelola madrasah yang efektif dan efisien serta selalu berusaha menciptakan iklim dan budaya madrasah yang kondusif.

Model kemitraan multistakeholder merupakan salah satu solusi dalam mengembangkan system Pendidikan yang bermutu di madrasah. Model kemitraan multistakeholder dalam MBS/M dan kurikulum Merdeka dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, pengelolaan sumberdaya madrasah yang efektif dan efisien serta pemberdayaan madrasah. Pengembangan mutu di madrasah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Hal ini dilaksanakan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan di madrasah dengan mengacu pada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu : standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan.

Implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka melalui Kemitraan Multistakeholder untuk Peningkatan Mutu di madrasah, dilaksanakan melalui langkah-langkah siklus sebagai berikut :



Gambar 2. Implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka di Madrasah

Implementasi Model MBS/M dan Kurikulum Merdeka untuk peningkatan mutu Madrasah melalui tahapan sbb:

1. Persiapan :

- a. Koordinasi dan Konsultasi dengan KEMENAG Wilayah Provinsi Jawa Barat, KEMENAG Kabupate/Kota untuk perencanaan Implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka di Madrasah.
- b. Pendataan dan Identifikasi Madrasah yang akan melaksanakan MBS/M dan Kurikulum Merdeka secara Mandiri.

2. Perencanaan

- a. Need assesment analisis lingkungan Internal dan lingkungan Eksternal di Madrasah yang akan melaksanakan MBS/M dan Kurikulum Merdeka secara mandiri.
- b. Membangun system pendidikan di Madrasah yang bermutu dengan mengelola pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- c. Pendampingan bagi Madrasah yang potensial untuk Merencanakan MBS/M dan kurikulum Merdeka atas rekomendasi dari KEMENAG Provinsi Jawa Barat dan KEMENAG Kabupaten/Kota untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan sesuai visi, misi, tujuan, dan kekhasan madrasah.
- d. Madrasah yang sudah siap menerapkan MBS/M dan Kurikulum Merdeka mengajukan usulan kepada KEMENAG Kabupaten/Kota.
- e. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengusulkan madrasah pelaksana MBS/M dan Kurikulum Merdeka kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
- f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat mengusulkan madrasah pelaksana MBS/M dan Kurikulum Merdeka kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapat penetapan.
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah pelaksana MBS/M dan Kurikulum Merdeka.

2. Pelaksanaan Pendampingan Perguruan Tinggi dalam Implementasi MBS/M dan kurikulum Merdeka di Madrasah.
 - a. Data dan potensi, pemetaan kebutuhan dan masalah dalam implementasi MBS/M dan Kurikulum merdeka di Madrasah.
 - b. Perencanaan bersama implementasi MBS/M dan kurikulum merdeka sesuai dengan kondisi dan potensi Madrasah.
 - c. Pendampingan dan bimbingan teknis dalam Penyusunan rencana MBS/M dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah.
 - d. Sosialisasi Program MBS/M dan Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah kepada stakeholder.
 - e. Evaluasi dan Pengembangan struktur kurikulum Merdeka di madrasah dan pengembangan MBS/M dan Learning Management System (LMS)
 - f. Pendampingan dalam implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka yang memberi ruang kreativitas dan inovasi kepada madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan.
 - g. Bimbingan teknis bagi pengelola Madrasah dalam mengembangkan system pendidikan yang bermutu, MBS/M, Peningkatan kapasitas dalam MBS/M, Manajerial, kepemimpinan bagi kepala sekolah.
 - h. Bimbingan teknis Perencanaan Pembelajaran bagi Guru Madrasah Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
 - i. Bimbingan teknis dalam melaksanakan Pembelajaran berbasis proyek di Madrasah dengan menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi.
 - j. Pendampingan dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar rahmatan lil alamin di Madrasah.
 - k. Pendampingan bagi guru Madrasah dalam melaksanakan PTK, penulisan artikel ilmiah dan publikasi di Jurnal ilmiah.
3. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Monitoring dan Supervisi dalam implementasi MBS/M dan kurikulum merdeka, pembelajaran, pendampingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola pembelajaran, baik guru, kepala madrasah, serta tenaga kependidikan lainnya.
 - b. Supervisi secara rutin , dilakukan ketika ada hasil kerja yang kurang optimal sehingga perlu ada upaya peningkatan kinerja bagi para pelaksana.
 - c. Evaluasi;
 - 1). Evaluasi Formatif, dilakukan saat proses kegiatan berlangsung.

- 2) Evaluasi sumatif, dilakukan saat berakhir kegiatan.
 - 3) Pada akhir program dilakukan evaluasi bersama stakeholder.
- d. Pelaporan , disampaikan kepada semua lembaga mitra yang bekerjasama dalam implementasi MBS/.M dan kurikulum merdeka. Dilaksanakan pada pertengahan program dan di akhir program.
 - e. Publikasi Ilmiah. Publikasi Ilmiah sangat penting untuk diseminasi model kemitraan multistakeholder dalam Implementasi MBS/M dan Kurikulum Merdeka.

D. KESIMPULAN

Model Kemitraan multistakeholder yang dilaksanakan di Madrasah sebagai upaya dalam melaksanakan system Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi ilmu pengetahuan, teknologi serta berakhlakul karimah. Model Kemitraan multistakeholder dalam implementasi MBS/M dan kurikulum Merdeka dilaksanakan dengan membangun System Pendidikan yang bermutu, adaptif , inovatif dengan memanfaatkan teknologi. Yang dapat memberi kemandirian madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, untuk meningkatkan daya saing madrasah sesuai dengan tuntutan kompetensi abad-21.

Model kemitraan multistakeholder dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, pengelolaan madrasah berbasis mutu yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan Madrasah yang efektif dan efisien, peningkatan kapasitas stakeholder, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, Pengembangan budaya mutu di madrasah serta Pemberdayaan Madrasah. Dalam melaksanakan model kemitraan multistakeholder ini peran Kepala sekolah sangat strategis dalam mengembangkan budaya mutu di Madrasah. Kepala sekolah memfasilitasi stakeholder untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu di Madrasah. Berkontribusi sesuai dengan peran dan fungsinya. Serta memberikan masukan kepada Kepala sekolah sebagai upaya perbaikan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Zarkasi. (2023). Manajerial: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 3 No. 2 Juni 2023 P-2797-5592 E-2797-5606.
- Ari Hasan Anshori. (2016). Pentingnya Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dalam Kepemimpinan Sekolah/ Madrasah Efektif. *TARBAWI*. ISSN 2442-8809. Volume 2. No. 01
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama no 347 Tahun 2022. Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 3/M/2021. Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 4 tahun 2022 Perubahan PP no 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Republik Indonesia. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tahun 2023. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat 2022-2024
- Qomar, M. (2002) Manajemen pendidikan islam. Malang: Erlangga; 2002.